

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Pembangunan disusun dengan perencanaan yang terencana, terpadu dan berkelanjutan dengan didukung oleh data dan informasi. Kegiatan analisis terhadap data dan informasi akan memberikan kemungkinan bagi penyusunan rencana yang lebih baik. Berdasarkan analisis data dan informasi yang dikumpulkan dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan serta permasalahan. Strategi dan kebijakan merupakan manifestasi terhadap pandangan dan pemahaman terhadap segala potensi dan permasalahan.

3.1. Kekuatan

Kekuatan adalah suatu kondisi yang ada di daerah dan dapat dianggap sebagai potensi. Kekuatan dan potensi tersebut dapat berupa sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumberdaya alam. Beberapa kekuatan yang dimiliki Kepulauan Riau adalah:

1. Kualitas dan Hasil Capaian Pembangunan

Kualitas pembangunan dilihat dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005 berada di urutan 8 dari 33 provinsi dengan 72,2 poin dan tahun 2006 naik di urutan 7 dengan 72,79 poin. Selanjutnya tahun 2007 IPM Kepulauan Riau naik lagi di urutan 6 dengan 73,68 poin jauh lebih tinggi dibanding tahun 2004 dengan 70,8 poin. Dengan demikian potensi dan peluang pembangunan di masa yang akan datang adalah dengan mempertahankan kondisi yang ada dan meningkatkan ke arah yang lebih baik.

Angka Harapan Hidup (AHH) setiap tahun semakin baik yaitu Tahun 2005 sebesar 69,5 tahun naik dibanding Tahun 2004 sebesar 68,8 tahun. Pada tahun 2006 AHH mencapai 69,6 tahun dan naik lagi pada tahun 2007 mencapai 69,9 tahun. Sebagai bagian dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), AHH perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan cara mempertahankan atau menurunkan angka kematian bayi (AKB) dari 35 per 1000 kelahiran hidup (sedangkan Nasional 46 per kelahiran hidup) menjadi 20 per 1000 kelahiran pada tahun 2025, Angka Kematian Ibu melahirkan, gizi buruk serta usia harapan hidup masih rendah yaitu 105 per 100 ribu ibu melahirkan.

Sementara itu, Angka Melek Huruf tahun 2007 sebesar 94,6 % naik dibanding tahun 2006 sebesar 93%. Sedangkan tahun 2005 sebesar 96 % yang berarti lebih tinggi dari tahun terakhir. Adapun angka rata-rata Nasional adalah 88,4 %. Terjadinya fluktuasi angka melek huruf dapat disebabkan oleh tingginya migrasi setiap tahun terutama adanya migrasi yang tidak terdidik.



2. Pluralitas Sosial Budaya

Dilihat dari aspek sosial dan budaya, Provinsi Kepulauan Riau dapat disebut sebagai *miniatur* Indonesia, karena terdiri dari ribuan pulau dan didalamnya hidup dan berkembang penduduk dengan pluralitas agama, suku dan budaya dengan tetap dipayungi oleh budaya Melayu guna mendukung kebudayaan nasional. Hampir semua suku bangsa dari seluruh provinsi dan berbagai pemeluk agama ada di Kepulauan Riau. Dengan demikian, keanekaragaman sosial serta aneka ragam suku dan agama dengan menjunjung tinggi kerukunan dan persatuan yang kuat merupakan modal sosial baik dalam pembangunan daerah maupun untuk ketahanan nasional. Potensi ini merupakan kekuatan sangat penting jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi pelaksanaan pembangunan maupun dalam rangka menjaga keutuhan dan persatuan bangsa yang merupakan pondasi pembangunan.

3. Geografis dan Geostrategis

Negara Republik Indonesia memiliki lebih 17.000 pulau, 14 % diantaranya ada di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki pulau sebanyak 2.408 buah. Karena itu Kepulauan Riau dijuluki dengan "*Segantang lada*". Di antara pulau yang banyak tersebut terdapat 19 buah pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Posisi dan kondisi geografis berada di jalur perdagangan dan lalu lintas perdagangan terpadat dunia yaitu Selat Malaka. Kondisi ini secara geopolitik dan geostrategis menjadikan Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan yang strategis. Provinsi Kepulauan Riau berpeluang besar menjadi daerah maju, berdaya saing dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Bagian Barat Indonesia. Hanya saja untuk mencapai itu, perlu percepatan pembangunan melalui optimalisasi potensi sumberdaya lokal terutama sumber daya manusia yang profesional, memiliki etos kerja dan mandiri untuk pengelolaan potensi sumber daya alam dan potensi lainnya. Posisi silang yang merupakan lintasan jalur pelayaran dari Barat ke Timur dan sebaliknya menjadi potensi besar bagi Kepulauan Riau jika dimanfaatkan secara optimal.

4. Sumberdaya Alam

Kepulauan Riau memiliki potensi perikanan, kelautan, bahan tambang dan mineral serta minyak dan gas yang melimpah. Pengelolaan potensi ini masih kurang 5 %, dan ini merupakan kekuatan yang menentukan pembangunan di masa yang akan datang. Potensi perikanan di Kepulauan Riau sekitar 1.500.000 ton, potensi minyak bumi yang terletak di Natuna dan Kepulauan Anambas diperkirakan sebesar 298,81 MMBO, gas alam di lokasi yang sama sebesar 55,3 TSCF. Sebaran kawasan pertambangan lepas pantai di wilayah Kepulauan Riau terdapat di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas. Potensi Timah terdapat di Karimun dengan jumlah 11.360.500 m³, Bauksit berjumlah 15 juta Ton di Bintan dan 880 ribu Ton di Tanjungpinang. Potensi lain seperti Granit sebesar



815,9 juta Ton di Karimun dan 42,4 juta Ton di Bintan. Sedangkan Pasir darat sebesar 16,8 juta Ton di Karimun dan 23,026 juta Ton di Bintan ditambah dengan pasir laut sejumlah 7 milyar Ton di Karimun dan 2,2 milyar Ton di Bintan.

Potensi sumber daya hutan di Kepulauan Riau merupakan potensi sebagai penyangga kehidupan, khususnya sebagai potensi perlindungan dan konservasi berbagai kegiatan pemerintahan, masyarakat, industri, dan keamanan. Dengan adanya aneka macam tipe sumber daya hutan, seperti hutan tropika basah dataran rendah, hutan tropika basah pegunungan dan juga hutan mangrove, maka diharapkan terjaga sumber kehidupan seperti pelestarian sumber air, tanah, dan keanekaragaman sumber daya hayati.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumberdaya mineral dan energi yang melimpah, seperti minyak dan gas bumi, timah, bauksit, granit, batupasir (batupasir kwarsa), dan kaolin yang tersebar di beberapa kabupaten. Kekayaan sumberdaya mineral dan energi tersebut potensi pengelolaannya kurang dari 5 %, sehingga merupakan kekuatan yang menentukan bagi pembangunan di masa datang.

Dengan kekuatan potensi sumberdaya energi Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai cekungan sedimen tersier Natuna, di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas mempunyai cadangan potensi minyak bumi sebesar 298.81 MMBO dan cadangan potensi gas bumi sebesar 55.3 TSCF, maka wilayah ini akan menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional yang sangat signifikan. Pemerintah merencanakan pembangunan pembangkit tenaga listrik berdaya 10.000 mega watt secara nasional, mestinya tidak terlepas dengan potensi sumberdaya energi Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu lokasi pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar minyak bumi atau gas bumi disamping sumber energi lain seperti pembangkit listrik dengan memanfaatkan batubara.

Potensi pembangkit tenaga listrik merupakan penggerak utama industri pengolahan yang berbasis sumberdaya mineral di beberapa kabupaten seperti fabrikasi dan pemanfaatan timah, fabrikasi dan pemanfaatan bauksit, fabrikasi industri bahan bangunan dari granit, fabrikasi industri bahan bangunan dari pasir kwarsa, fabrikasi industri keramik dari kaolin. Industri tersebut dapat berskala kecil, menengah, maupun besar. Pemanfaatan sumberdaya mineral secara optimal menjadi bahan industri jadi atau setengah jadi akan meningkatkan nilai tambah ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional juga akan meningkat. Disamping itu pemanfaatan sumberdaya mineral secara optimal akan meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan usaha konservasi sumberdaya mineral (meningkatkan usia penambangan dan penggalian), dan menekan kerusakan lingkungan.



3.2. Kelemahan

Provinsi Kepulauan Riau selain memiliki beberapa kekuatan, juga memiliki beberapa kelemahan antara lain:

1. Rendahnya Daya Saing

Percepatan pembangunan membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan prima menjadi salah satu ukuran utamanya dengan dukungan peran serta masyarakat dan dunia usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik menyaratkan adanya aparat pemerintah yang mampu memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat. Diperlukan pula aparat yang cakap mendorong sinergitas antara birokrasi, masyarakat dan dunia usaha. Dengan kondisi dimana jumlah aparatur pemerintah yang relatif terbatas dengan usia pemerintahan yang masih muda, terjadinya beberapa tindak kejahatan dan pelanggaran dalam administrasi dan keuangan daerah, ditambah merebaknya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), menjadi masalah mendasar birokrasi Provinsi Kepulauan Riau.

Dampak langsungnya terasa kepada rendahnya kualitas pelayanan dasar masyarakat, terutama di sektor yang begitu vital yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi khususnya pelayanan investasi. Kepulauan Riau menjadi daerah yang memiliki daya saing yang rendah, terutama penduduk lokal dimana masih rendahnya rata-rata pendidikan dan persentase penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi yang masih rendah. Terdapat angka kemiskinan yang relatif tinggi diatas 10 persen dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah terutama keterampilan dan keahlian baik di perkotaan apalagi di perkotaan ditambah dengan mobilitas penduduk yang tinggi akibat migrasi sehingga persaingan antara penduduk lokal dan pendatang semakin berat. Rendahnya daya saing dapat dilihat dari masih terbatasnya penyerapan lapangan kerja khususnya penduduk lokal, dan masih kurangnya kemampuan teknis tenaga kerja dibandingkan dengan tenaga kerja dari luar daerah apalagi dari luar negeri.

Daya saing juga dilihat dari produk barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi, dengan peran yang masih rendah dalam pembentukan ekonomi dari hasil pengolahan sumber daya alam, dan hasil pertanian, perikanan dan pengolahannya yang masih belum optimal. Daya saing rendah juga dilihat dari masih terbatasnya pendidikan penduduk dalam menempuh pendidikan tinggi dimana hanya 2 % penduduk pedesaan dan 6 % penduduk perkotaan yang menamatkan pendidikan tinggi.

2. Terbatasnya Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur dasar masih terbatas baik pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik serta infrastruktur perhubungan dan ekonomi lainnya seperti pelabuhan, dermaga dan jalan terutama di wilayah pesisir dan pulau kecil. Kondisi wilayah Kepulauan Riau yang



tersebar dan terpisah lautan menyebabkan infrastruktur strategis masih terbatas dan cukup memprihatinkan terutama bagi daerah yang terpencil dan pulau terluar. Kesenjangan pembangunan infrastruktur antar-wilayah dan antar-sektoral, menjadi salah satu pemicu ekonomi biaya tinggi dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah serta sulitnya investasi masuk berkembang secara merata. Besarnya biaya pembangunan infrastruktur di kepulauan juga menjadi sebab dari terbatasnya pembangunan infrastruktur di Kepulauan Riau.

Percepatan pembangunan harus pula berorientasi pada pembangunan berkelanjutan Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi kepulauan sepatutnya memprioritaskan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) terbarui. Fokus pengelolaan SDA harus berkiblat pada keberlanjutan masa depan lingkungan dan memihak kepentingan masyarakat terutama yang berlokasi di sekitar sumber daya alam tersebut.

Terbatasnya sarana kelistrikan terutama di daerah yang cepat tumbuh seperti Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang akibat terbatasnya daya pembangkit listrik dan masih terhambatnya pengembangan kelistrikan akibat peraturan yang tidak kondusif. Sarana kelistrikan di pulau lainnya dan daerah terpencil belum merata sehingga mengganggu produktivitas dan kemajuan masyarakat terutama dalam rangka pembangunan sumber daya manusia, pelaksanaan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan kegiatan ekonomi produktif masyarakat.

Kurangnya sarana air bersih terutama di Bintan dan Tanjungpinang yang disebabkan terbatasnya sumber dan debit air, terbatasnya sarana pengolahan dan distribusi, masih terjadinya perusakan lingkungan sekitar danau atau waduk akibat komersialisasi lahan sekitar danau atau waduk oleh masyarakat ditambah dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan sekitar sumber air seperti penghijauan untuk mendukung kemampuan penyediaan sumber air.

Ketimpangan layanan infrastruktur dan utilitas antar wilayah dan pulau dapat menyebabkan tidak berkembangnya daya saing antar wilayah. Pembangunan infrastruktur masih terpusat di daerah yang relatif sudah maju seperti di Kota Batam dan Tanjungpinang sekitarnya. Sedangkan daerah lain seperti Bintan, Lingga, Karimun, Natuna dan Kepulauan Anambas belum memiliki infrastruktur yang memadai. Ketimpangan pertumbuhan antar kawasan, antar kota dan antar wilayah masih mewarnai pembangunan daerah. Kurangnya pemerataan pembangunan sarana prasarana, distribusi sumberdaya yang tidak seimbang dan terhambatnya pengembangan ekonomi unggulan mempengaruhi keadaan ini.

3. Lemahnya Penegakan Hukum dan Pelaksanaan Demokrasi

Percepatan pembangunan memerlukan tertib hukum guna memberikan rasa aman dan menjamin kepastian hukum. Masyarakat sadar dan taat hukum akan menentukan



kemajuan sebuah daerah. Supremasi hukum harus dijalankan dan tidak boleh terkontaminasi kepentingan politik dan pelaksanaannya harus merata bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan lemahnya penegakkan hukum di dalam masyarakat terutama oleh aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum harus sejalan dengan keinginan untuk menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di Bagian Barat Indonesia. Penegakan hukum diperlukan agar adanya jaminan bagi kelestarian lingkungan hidup akibat pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Sebagai wilayah yang dikelilingi oleh lautan dan berbatasan dengan pusat perdagangan yang maju, maka penegakan hukum serta efisiensi akan mempengaruhi minat investor untuk melakukan investasi.

Rendahnya kesadaran dan penegakan hukum dipicu oleh masih terbatasnya personil khususnya Pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan bidangnya, luasnya wilayah yang diawasi dan semakin berkembangnya teknologi bagi pelaku pengrusakan lingkungan dan penyalahgunaan wewenang. Beragamnya kasus yang muncul menimbulkan dampak bagi aparaturnya untuk melakukan KKN yang melibatkan semua komponen masyarakat, pengusaha dan termasuk aparat pemerintah dari pusat sampai ke daerah.

Masih belum siapnya masyarakat baik secara moral dan mental menerima arus globalisasi terutama dampak negatif. Hal ini tercermin dari berbagai gejala yang terjadi, seperti semakin maraknya pornografi dan pornoaksi, pelecehan seksual, kejahatan narkoba, penyelundupan barang atau penjualan/perdagangan orang, pembunuhan dan perampokan. Kesiapan masyarakat ini sangat erat kaitannya dengan masalah Iman dan taqwa. Hal ini menunjukkan walau kehidupan beragama sudah cukup baik namun pemahaman dan pengamalan terhadap ajaran agama relatif masih lemah.

4. Belum Efektifnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Desentralisasi adalah salah satu prinsip dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan di daerah yang diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini telah memberikan nuansa tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, memberikan ruang lebih luas bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri mulai dari merencanakan, melaksanakan dan mengawasi. Namun, dalam pelaksanaannya prinsip desentralisasi belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, bahkan berbagai gejala di beberapa daerah masih terjadi sebagai akibat belum dipahaminya UU tersebut secara utuh baik oleh penyelenggara pemerintah di pusat maupun komponen masyarakat dan pemerintah di daerah. Disamping itu, masih cukup banyak substansi penting untuk mengimplementasikan UU tersebut belum ditindaklanjuti.



Perbedaan persepsi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, termasuk antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan otonomi daerah, khususnya terkait dengan pembagian urusan yang menjadi kewenangan masing-masing, merupakan salah satu fenomena yang mengiringi dinamika penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Selain itu pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan untuk mengelola kawasan perbatasan internasional, sementara berbagai permasalahan yang terkait dengan tata ruang dan perbatasan seringkali muncul di kawasan tersebut. Keterbatasan kewenangan tersebut mengakibatkan kawasan perbatasan internasional menjadi rawan konflik, wilayah perairan diluar wilayah kewenangan daerah rawan pengrusakan dan pencurian. Dalam hal ini diperlukan 'otonomi khusus' bagi pemerintah daerah Kepulauan Riau yang secara fisik geografis berbatasan dengan negara lain, terutama dalam urusan-urusan yang terkait dengan tata ruang wilayah dan dalam rangka menghadapi kerjasama tertentu dengan negara-negara tetangga.

Jumlah dan kualitas aparatur pemerintah Provinsi Kepulauan Riau relatif masih rendah, hal ini disebabkan provinsi Kepulauan Riau yang relatif masih baru. Profesionalisme aparatur pemerintah tercermin dari kualitas pelayanan yang diberikan aparatur birokrasi kepada masyarakat. Selain itu, kinerja aparatur dan standar kompetensi yang diterapkan kepada seluruh tingkatan aparatur belum berjalan dengan baik.

5. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya

Pada aspek sumber daya alam, pemanfaatan potensi masih rendah dan terbatas, kurang terarah, kurang terpadu dan relatif tidak berkesinambungan serta belum secara langsung memberi manfaat bagi masyarakat sekitar lokasi sumber daya. Hal ini meyebabkan pemanfaatan potensi sumber daya alam belum mampu memberikan pengaruh yang optimal terhadap perekonomian daerah dan sekaligus belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam bagi perekonomian masyarakat antara lain tercermin dari tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi terutama yang berada di pesisir dan pulau terpencil dan kawasan perkotaan. Potensi kelautan dan perikanan belum dieksplorasi secara maksimal, demikian pula potensi minyak dan gas serta tambang mineral lainnya belum memberikan manfaat secara signifikan terhadap perekonomian daerah.

Dengan jumlah penduduk dengan rata-rata kepadatan yang cukup besar seharusnya merupakan potensi bagi pembangunan. Namun dengan keberadaan sumberdaya manusia dengan kualitas yang masih rendah menjadi hambatan, tantangan, dan sekaligus ancaman bagi kelangsungan pembangunan di daerah. Sumberdaya manusia yang ada di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di perkotaan, mayoritas merupakan



penduduk pendatang baik datang dengan *skilled* maupun *unskilled*. Perkembangan penduduk yang didominasi oleh migrasi memberi dampak negatif bagi daya dukung lahan berupa terbatasnya ruang bagi kegiatan dan tempat tinggal yang layak terutama di perkotaan seperti di Batam dan Tanjungpinang. Dengan demikian perlu upaya pengendalian penduduk agar daya dukung dan daya tampung lingkungan memenuhi kebutuhan yang layak.

Belum tersedia penataan ruang yang tepat sesuai dengan kondisi ekologis dan rasio pemanfaatannya. Keadaan ini terlihat dengan adanya pemanfaatan lahan yang kurang ramah terhadap kondisi ekologis kawasan, seperti adanya konversi lahan hutan, penggundulan hutan alam, reklamasi hutan mangrove tanpa melihat kondisi lanscape ekologinya dan lainnya.

6. Dualisme Ekonomi yang Memunculkan Efek Demonstrasi Kemakmuran

Terdapat kecenderungan dualisme ekonomi yang sangat kentara antara sektor ekonomi modern dan tradisional, antara ekonomi kota dan desa, antara pusat dan pinggiran, antara industri, jasa dan pertanian, perikanan rakyat. Hal ini menimbulkan efek demonstrasi kemakmuran oleh lapisan masyarakat yang memiliki kesempatan untuk berkarya di sektor modern, kota, pusat dan pada sektor industri, jasa, sehingga mereka yang berada di luar wilayah dan sektor modern akan tertarik untuk turut memperoleh kesempatan tersebut. Bahkan sisi sektor tradisional wilayah yang sedang tumbuh pesat ini bukan hanya mencakup wilayah itu sendiri, tetapi seluruh wilayah Indonesia sebagai pemasoknya akibat besarnya daya tarik pusat ekonomi seperti Batam.

3.3. Peluang

Pemahaman terhadap kekuatan sekaligus kelemahan yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau merupakan langkah penting dalam proses perencanaan. Namun terdapat hal penting lainnya yang perlu diperhatikan yaitu adanya peluang dari luar provinsi yang dapat mendukung upaya pembangunan dan pengembangan wilayah. Peluang-peluang tersebut antara lain:

1. Kemajuan Ekonomi Nasional dan Negara Tetangga

Kepulauan Riau memiliki eksternalitas positif wilayah yang tinggi karena berada dalam Segitiga Pertumbuhan Singapura, Johor dan Kepulauan Riau. Kepulauan Riau juga merupakan daerah tujuan wisata andalan nasional setelah Bali, namun belum mampu menangkap peluang besar ini secara maksimal dalam pembangunan daerah dan pengembangan serta pemberdayaan kepariwisataan Kepulauan Riau terutama yang bermanfaat bagi ekonomi masyarakat. Kemajuan ekonomi negara tetangga menjadi peluang bagi pemasaran dan pengembangan teknologi dalam semua bidang. Kemajuan



ekonomi nasional menjadi peluang bagi pemasaran hasil dan peningkatan produktivitas produk-produk yang dibutuhkan daerah lain, dan dapat di ekspor guna memenuhi kebutuhan luar negeri dan ini akan mendukung perekonomian nasional.

2. Berbatasan dengan Negara Maju

Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang sudah maju seperti Singapura, akan mengalami pengaruh dan dampak dari perubahan global. Singapura sebagai salah satu basis ekonomi dunia, karena hampir semua perwakilan dagang seluruh dunia berkantor disini. Dengan demikian posisi dan kondisi yang dimiliki Singapura menjadi peluang bagi Kepulauan Riau untuk pemasaran dan promosi potensi daerah serta menjadikan pintu masuk bagi kegiatan ekspor daerah ke negara lain maupun ekspor nasional yang melewati pelabuhan hub internasional yang ada di Kepulauan Riau.

Wilayah yang berbatasan dengan negara maju juga menjadi motivasi di dalam upaya peningkatan standar kebutuhan dan kemajuan pembangunan. Standar pembangunan dan pemakaian teknologi dari negara maju yang berdekatan akan menjadi peluang untuk dimanfaatkan bagi peningkatan daya saing daerah.

3. Perkembangan Lingkungan Global

Perkembangan di era Abad 21 ditandai dengan *Revolusi 3 T* yaitu *Transportasi, Telekomunikasi dan Turisme*. Semakin banyak, beragam dan canggihnya sarana transportasi dan telekomunikasi menyebabkan semakin cepat dan mudahnya pergerakan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga mempercepat kegiatan wisata. Kemajuan 3 T memberikan kemudahan dan kecepatan dalam penyampaian informasi keseluruh pelosok dunia, dari kota besar bahkan sampai tempat yang terpencil dan pelosok. Hal ini akan menimbulkan daya tarik dan rangsangan luar biasa bagi perkembangan pariwisata secara positif. Selain ketiga aspek tersebut, pada kurun waktu beberapa tahun terakhir ini masalah terorisme, pemanasan global dan kelestarian lingkungan menjadi sorotan internasional.

Provinsi Kepulauan Riau sebagai beranda terdepan Indonesia, menghadapi berbagai masalah disebabkan oleh krisis baik dibidang politik, pemerintahan dan keamanan namun tetap mampu bertahan. Krisis tersebut mendorong terjadinya reformasi pemerintahan, Hukum dan HAM. Beberapa aspek yang terangkat dalam proses reformasi tersebut antara lain *Demokrasi, Dis-integrasi, Desentralisasi dan Debirokratisasi*. Dengan perkembangan reformasi yang demikian cepat mempengaruhi tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kemudahan dan percepatan proses informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Kemajuan iptek memberikan peluang bagi peningkatan daya saing daerah mulai dari pemasaran,



pengolahan dan pemanfaatan sumberdaya serta memberdayakan masyarakat dalam kehidupan yang lebih luas baik regional dan nasional.

4. Dampak Reformasi

Reformasi yang dimanfaatkan secara positif akan memberi peluang bagi pengembangan daerah. Reformasi telah memicu percaturan dan pergolakan politik nasional. Kemajuan yang cukup menonjol pada aspek demokrasi adalah terlaksananya pemilihan umum secara langsung, baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif, serta pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Kondisi ini mampu meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Sehubungan dengan semangat demokratisasi tersebut, telah berkembang kesadaran akan prinsip-prinsip keterwakilan berdasarkan suara terbanyak, bukan berdasarkan urutan yang ditetapkan oleh partai. Di samping itu, pada level akar rumput, di Provinsi Kepulauan Riau, pembangunan politik yang semakin demokratis terlihat dari meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan politik, seperti meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai aktifitas kebijakan publik mulai dari tingkat pemerintahan desa (pemilihan Kepala Desa), sampai pada pemerintah kabupaten (Pemilihan Bupati/Walikota), dan meningkatnya peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini sejalan dengan berkembangnya institusi non pemerintah (NGO) yang mampu memainkan peran penting dalam proses pembangunan demokrasi dan politik di Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan sejarah dan semangatnya, Provinsi Kepulauan Riau lahir sebagai akibat dari munculnya gerakan reformasi yang menuntut otonomi sebagai daerah baru. Melalui proses yang panjang akhirnya Provinsi Kepulauan Riau dapat eksis sebagai satu provinsi yang patut diperhitungkan dalam kancah nasional.

5. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Dalam melihat perspektif Provinsi Kepulauan Riau dalam skala regional, dapat dilihat bahwa secara umum Indonesia dibagi menjadi dua kawasan yaitu Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Ditinjau dari sisi pengembangan pembangunan dibagi menjadi wilayah Regional A, B, C, D dan E. Kesenjangan pembangunan antar kawasan atau region masih cukup besar khususnya dari aspek perkembangan ekonomi daerah. Upaya antisipasinya adalah telah dilaksanakan restrukturisasi sistem perekonomian dan moneter sehingga daerah ini dapat berperan sebagai pemicu perkembangan daerah yang berdekatan. Hal ini dimungkinkan dengan melihat potensi dan kondisi geografis dan sumber daya yang dimiliki.

Dengan semakin berkembangnya perekonomian nasional akan memberikan dampak bagi kebijakan pembangunan secara keseluruhan, dan ini menjadi peluang yang cukup penting bagi Kepulauan Riau dalam menjalankan pembangunan dimasa datang.



6. Efisiensi Pembangunan

Guna meningkatkan daya saing dalam skala regional, aspek paling menonjol yang mempengaruhi peningkatan daya saing tersebut adalah terkait dengan efisiensi, efektivitas, ekonomi dan lingkungan (*environment*). Berkaitan dengan masalah efisiensi, terlihat secara nyata di dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan sumber daya yang ada. Meningkatnya tingkat efisiensi pembangunan dan pemerintahan di KBI antara lain disebabkan karena pembangunan lebih diarahkan pada daerah yang sudah berkembang (produktif) dan tidak saja dalam pembangunan infrastruktur. Dengan perkembangan sistem dan IT maka efisiensi pembangunan dapat ditingkatkan sehingga kualitas pembangunan juga akan semakin meningkat.

3.4. Tantangan

Faktor-faktor lain yang muncul dari luar Provinsi Kepulauan Riau dapat berpengaruh terhadap proses pembangunan dan pengembangan wilayah provinsi. Faktor-faktor yang merupakan tantangan yang harus dihadapi antara lain:

1. Pengaruh Global

Perubahan lingkungan global demikian cepat, memberikan dampak yang cukup besar bagi Indonesia, baik dampak positif maupun negatif. Perubahan yang terjadi di belahan dunia lain dapat diketahui dalam waktu cepat di seluruh pelosok termasuk Kepulauan Riau. Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi tidak dapat dicegah dan dibatasi. Hal yang perlu dilakukan adalah mendorong masyarakat agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi secara positif dan membentenginya agar dapat terhindar dari pengaruh negatif dari globalisasi. Setiap perubahan dan perkembangan sebuah nilai akan memberikan pengaruh atau "perbenturan" dan dikotomi implementasi dari pemahaman antara Iman dan Taqwa (Imtaq) dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Sering terlihat adanya fenomena terjadinya "pergeseran" nilai-nilai agama, sosial dan budaya, dengan indikasi antara lain maraknya pergaulan bebas bahkan sejak kehidupan remaja, penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya (narkoba), penjualan manusia (wanita dan anak), penyelundupan, pembunuhan, serta penyalahgunaan kewenangan kekuasaan yang diindikasikan antara lain maraknya kasus KKN. Dengan letak dan posisi Provinsi Kepulauan Riau yang langsung berbatasan dengan negara lain, pengaruh dan dampak positif maupun negatif akan secara langsung mempengaruhi masyarakat di daerah ini.



2. Inefisiensi Pembangunan

Sejalan dengan semangat visi dan misi pembangunan, diantaranya untuk mendorong laju pengembangan perekonomian daerah agar dapat sejajar dengan kemajuan daerah lain dikawasan KBI, hal ini dapat terwujud melalui peningkatan daya beli dan daya saing masyarakat/daerah. Dengan rendahnya daya saing daerah, maka akan berpengaruh terhadap keinginan investasi bagi para investor luar negeri.

Dari aspek ekonomi, disadari bahwa pembangunan di KBI yang dilaksanakan selama ini sangat menonjolkan aspek ekonomi, namun kurang memperhitungkan aspek sosial. Hal ini tercermin dari pengalokasian dana/investasi pembangunan, khususnya dari anggaran pemerintah, terlebih lagi dengan semakin tingginya biaya untuk pembangunan infrastruktur namun kurang diberikan kepada pembangunan sosial dan politik (*political cost*) dan biaya keamanan (*security cost*). Hal ini menyebabkan roda perekonomian berjalan cepat dan kemajuan perekonomian di KBI telah mendorong para pemilik modal untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan mendapatkan keuntungan dari kondisi ketimpangan tersebut, namun kurang mengantisipasi akan adanya perubahan sosial yang lebih besar seperti PHK dan kerusuhan sosial akibat macetnya sebuah kegiatan ekonomi dalam arti menjamin ketahanan sosial ekonomi masyarakat. Di samping untuk mempertahankan semangat nasionalisme, sejatinya ekonomi tidak terpengaruh oleh sistem ekonomi lain walaupun hidup dalam pergaulan antar negara dengan ekonomi yang sudah maju.

3. Kelestarian Lingkungan

Degradasi lingkungan yang ditandai dengan terjadinya berbagai kerusakan lingkungan akibat perbuatan tangan manusia yang sudah tidak peduli dengan masalah lingkungan dapat berdampak terhadap menurunnya bahkan rusaknya kualitas lingkungan hidup dan biota laut. Kondisi lingkungan hidup di Kawasan Barat Indonesia (KBI) termasuk Provinsi Kepulauan Riau cukup memprihatinkan. Wilayah tangkapan ikan yang kualitasnya semakin buruk serta lahan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan semakin meluas. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah semakin meningkatnya pencemaran laut baik dipantai maupun diperairan yang dalam serta berkurangnya debit air, semakin rendahnya produktifitas lahan dan terjadinya banjir, tanah longsor dan sebagainya.

Provinsi Kepulauan Riau diberi kodrat oleh Allah maha pencipta memiliki darat dan laut yang tidak seimbang, dengan 97 persen lautan dan 3 persen daratan dengan kewenangan yang ada di daerah hanya mampu dikelola sesuai dengan kewenangan yaitu sebesar 12 mil dari pantai, ini juga memberikan sebuah beban yang berat bagi daerah mengingat kondisi riil di lapangan yang di atas 12 mil juga menjadi sesuatu yang perlu dikelola dan diamankan oleh Pemerintah Daerah. Potensi kelautan dan tambang



yang besar perlu dimanfaatkan dengan teknologi dan kemampuan sumberdaya manusia. Tantangan yang berat adalah bahwa kondisi di lapangan belum sampai 5% potensi kelautan dieksplorasi dan dikembangkan. Namun jika dieksploitasi secara terus menerus akan menjadikan Kepulauan Riau dimasa datang akan terjadi kelangkaan sumberdaya.

Sumber daya hayati alam Kepulauan Riau sangat beragam, terdapat aneka tipe hutan, seperti hutan mangrove di pantai, hutan tropika basah dataran rendah, dan juga hutan tropika basah pegunungan. Aneka tipe hutan menyebabkan kawasan Kepulauan Riau mendapat dukungan pelestarian untuk berbagai kegiatan masyarakat. Penyangga kehidupan Kepulauan Riau diharapkan dapat terpenuhi dengan adanya aneka macam tipe sumber daya hutan.

4. Distribusi Pembangunan

Tingginya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum menjamin meratanya kualitas pembangunan manusia. Keadaan ini terutama dipicu oleh rendahnya distribusi pembangunan infrastruktur fisik dan sumberdaya manusia, baik pembangunan dari aspek pendidikan, kesehatan, pendapatan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh karena itu masih diperlukan penyiapan sarana dan prasarana bagi kebutuhan masyarakat dan peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan serta distribusi peningkatan daya beli masyarakat.

5. Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Perbatasan

Kawasan pesisir, laut, perairan pulau-pulau kecil dan pulau terluar relatif “belum tersentuh”. Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam di kawasan tersebut sebagai *prime mover* pertumbuhan ekonomi regional secara nyata walaupun secara nasional sudah diarahkan bagi kepentingan nasional serta sumber pendapatan masyarakat terutama di sektor perikanan dan pariwisata. Dengan demikian pemanfaatan dan pengelolaan pulau kecil yang dilakukan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan akan menyebabkan hilang atau berkurangnya kualitas pulau dimasa yang akan datang.

6. Demokrasi

Walaupun dampak demokrasi adalah positif dengan meningkatnya kesadaran dalam berdemokrasi, namun eksekusi memprihatinkan yang mungkin muncul ke permukaan adalah “demokrasi yang kebablasan”, yang ditandai dengan maraknya unjuk rasa yang kerap kali disertai dengan anarkisme, penghujatan dan pengrusakan. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan jangka panjang perlu diantisipasi agar kondisi ini tidak berlanjut sehingga merugikan daerah dan negara secara terus menerus.



3.5. Permasalahan

Berdasarkan uraian dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi isu-isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan Daerah Kepulauan Riau dalam kurun waktu duapuluh tahun kedepan, yaitu sebagai berikut:

1. Tingginya tingkat perkembangan penduduk, yang jika tidak dikendalikan dan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan dan penyediaan sarana dan prasarana dasar akan menimbulkan permasalahan di masa depan. Tidak terkendalinya perkembangan penduduk akan menyulitkan penyusunan rencana pembangunan terutama yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan dasar dan pelayanan publik. Distribusi penduduk secara merata dan ketimpangan pada satu atau dua daerah memberi dampak bagi kesenjangan pembangunan di setiap wilayah Kabupaten/ Kota. Masalah sosial yang utama dilihat dari kesenjangan distribusi dan kepadatan penduduk. Penduduk Kepulauan Riau sebagian besar (52,4%) terkonsentrasi di Pulau Batam yang luasnya hanya 11,3 % dari luas Kepulauan Riau. Sebaliknya Pulau Natuna, Lingga dan Jemaja serta Bintan yang memiliki luas sekitar 88,7% dari luas Kepulauan dihuni oleh 47,6% penduduk Kepulauan Riau.
2. Rendahnya kualitas dan daya saing tenaga kerja khususnya tenaga kerja lokal dalam memanfaatkan potensi lapangan kerja, terbatasnya kesempatan kerja serta masih rendahnya produktivitas tenaga kerja.
3. Masih rendahnya kesadaran pengusaha akan kelestarian alam dan lingkungan seperti upaya pemulihan lingkungan lokasi-lokasi pasca tambang dari kegiatan industri penambangan pasir, kerusakan hutan akibat pembakaran dan *illegal logging*.
4. Lambatnya penanganan masalah pencemaran akibat kurang mendukungnya produk hukum bagi penindakan pelanggaran pencemaran dan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan masalah lingkungan yang masih rendah akibat semakin kompleksnya permasalahan lingkungan pada setiap wilayah.
5. Pemanfaatan dan pengambilan sumber daya alam secara illegal seperti pengambilan hasil laut/perikanan, harta karun, pasir/tanah dan hasil hutan seperti kayu dan kurang memperhatikan kelestarian lingkungan.
6. Belum dikelolanya limbah domestik, limbah B3 sebagai hasil sisa hasil proses produksi dari kegiatan industri, limbah medis, dan lainnya. Belum berperannya teknologi dalam pengolahan sampah domestik baik sampah rumah tangga, pasar dan industri.



7. Pencemaran laut akibat tumpahan minyak di Laut maupun maupun akibat tumpahan minyak dari *Tank Cleaning* Industri Galangan Kapal, yang memerlukan pengawasan dan pengendalian pencemaran laut.
8. Semakin sempitnya daerah penangkapan ikan yang mengakibatkan alih fungsi (alur layar) bagi nelayan, serta menyebabkan usaha budidaya laut mengalami kerugian
9. Belum sepenuhnya terwujud peran masyarakat dalam pembangunan akibat masih rendahnya kesadaran akan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari kepribadian masyarakat yang maju dan berbudaya.
10. Belum dimanfaatkannya secara optimal kondisi dan letak geografis bagi pembangunan dan kemajuan daerah sehingga kondisi riil antara negara tetangga dengan Kepulauan Riau masih terdapat perbedaan yang sangat menyolok, padahal dalam sejarahnya antara Kepulauan Riau dengan Singapura dan Malaysia merupakan satu rentetan sejarah yang sama namun mengalami perkembangan pembangunan yang berbeda.
11. Belum dikelolanya sumber daya alam terutama sumber daya kelautan dan pertambangan secara baik dan belum secara signifikan memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah akibat rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang mampu mengolah dan mengembangkan potensi. Selama ini hanya berharap dengan pembagian dana bagi hasil, dan belum seimbang dengan potensi yang dimiliki dan beban pembangunan yang mesti ditanggung oleh daerah akibat besarnya biaya untuk membangun wilayah bersifat kepulauan seperti Kepulauan Riau. Oleh karena itu penetapan luas wilayah lautan dan banyaknya pulau perlu mendapat perhatian dalam penentuan bobot biaya pembangunan secara nasional. Perlu lebih mengintensifkan pemanfaatan hasil kelautan dan mengembangkan industri yang mendukung kegiatan ekonomi maritim dan berguna bagi kegiatan ekonomi daerah yang utama baik untuk industri, pariwisata, perdagangan dan transportasi maupun bagi pengembangan pendidikan melalui riset kelautan.
12. Pada aspek sumberdaya buatan di samping jumlah dan kualitas serta kapasitasnya yang belum memadai, masalah penyebaran, pemanfaatan serta pemeliharanya masih menjadi kendala. Tidak kalah pentingnya aspek SDS juga cukup mempengaruhi kemajuan pembangunan daerah yaitu peran organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik serta organisasi keagamaan baik dalam pembangunan maupun pengendalian dan pemanfaatannya. Kendala yang dihadapi selama ini berupa jalinan kemitraan yang masih belum terbina secara optimal.



13. Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang ditandai dengan kerusakan ekosistem kawasan hutan, lahan mangrove, pesisir pantai dan laut, konversi penggunaan lahan, krisis air bersih. Pencemaran laut dan perairan sebagai sumber utama ekosistem perikanan, meluasnya lahan kritis, dan perubahan iklim yang sebagian besar diakibatkan oleh kesalahan perilaku manusia dalam mengelola sumber daya alam. Rendahnya upaya pemulihan lingkungan baik yang merupakan dampak pengelolaan pertambangan maupun eksploitasi kawasan hutan dan kawasan pantai. Jika ini tidak diantisipasi maka kualitas lingkungan akan semakin menurun dan mengakibatkan daya dukung lingkungan dalam mendukung aktivitas penduduknya akan semakin berkurang.
14. Tingginya laju degradasi hutan dan meluasnya lahan kritis, menurunnya kuantitas dan kualitas air (baik air tanah maupun permukaan), bencana kekeringan pada lahan sawah seperti di Lingga, Natuna dan Bintan yang dapat menyebabkan gagal tanam dan bahkan gagal panen dan mempengaruhi ketahanan pangan dari waktu ke waktu. Kondisi ini juga akan lebih diperparah oleh dampak perubahan iklim global.
15. Di wilayah perairan pantai terjadi kerusakan ekosistem yang cukup parah, antara lain disebabkan tindakan manusia yang mengeksploitir Sumber Daya Alam Hayati secara tidak terkendali tanpa peduli kelestariannya seperti pengambilan terumbu karang, pengeboman ikan dan juga pencemaran akibat pembuangan limbah dari usaha pertambangan dan pengerukan pasir laut dan pembuangan minyak tanker baik yang disengaja maupun akibat kecelakaan. Hal yang sangat dikhawatirkan adalah terjadinya kebocoran pipa bawah laut hasil pengolahan gas lepas pantai di Laut China Selatan yang dialirkan ke Singapura melalui laut di Kepulauan Riau.
16. Belum terkelolanya dengan baik pluralitas agama, suku dan budaya sebagai modal sosial; hal ini dapat dilihat masih rentannya isu agama, suku dan budaya dalam pergaulan kehidupan sosial dan politik serta ekonomi. Hal ini perlu diantisipasi agar kesatuan dan persatuan serta kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam bernegara dan berbangsa dapat tetap dipertahankan dan ditingkatkan.
17. Masih tingginya kesenjangan pembangunan antar wilayah, yang dilihat dari adanya daerah yang IPM-nya tinggi dan daerah dengan IPM yang rendah. Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun merupakan kota/kabupaten yang IPM nya relatif baik sedangkan Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna (termasuk Kepulauan Riau Anambas sampai tahun 2007) masih berada di peringkat yang relatif rendah.



18. Masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial akibat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Secara kultural kemiskinan dan pengangguran bagi penduduk setempat adalah sebuah hal yang memalukan dan tabu. Namun dengan perkembangan penduduk akibat migrasi dan mempengaruhi komponen dan jenis penduduk maka pengangguran menjadi hal yang perlu diatasi dalam setiap kebijakan pembangunan.
19. Struktur umur penduduk Kepulauan Riau melebar pada struktur umur produktif, yaitu penduduk yang berada pada kelompok usia kerja (15-64 th) sejumlah lebih dari 57%. Namun demikian usia 0-4 tahun yang mencapai angka 12% juga merupakan beban dalam menyiapkan sarana pendidikan dalam masa yang akan datang. Kelompok usia produktif masih dalam kondisi ketertinggalan dan lemahnya akses terhadap kegiatan produksi maupun pasar kerja. Lebih khusus lagi indeks Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini disebabkan karena proporsi penduduk yang sedang sekolah cukup tinggi sehingga di masa yang akan datang akan terjadi permintaan lapangan kerja terdidik yang cukup besar. Masih terdapatnya angka buta aksara dan putus sekolah, walaupun masih berada dibawah 5 %. Masyarakat dengan pendidikan yang rendah akan menjadi beban pembangunan dan ini terkait dengan kebijakan kependudukan dan pendidikan yang harus berjalan seirama. Masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan; walaupun masih berada dibawah rata-rata nasional. Hal ini terutama di daerah yang terisolir dan kawasan *slum* di perkotaan.
20. Tingginya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektoral dan kepemilikan sumberdaya antar kelompok masyarakat; lemahnya koordinasi pemerintahan dan pembangunan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan serta penegakan hukum dan rendahnya kualitas pelayanan publik.
21. Menurunnya kualitas lingkungan hidup baik lingkungan di darat, di laut maupun di udara. Termasuk dalam hal ini adalah masih lemahnya penataan kawasan perkotaan dan kawasan pesisir dan pulau kecil serta pulau perbatasan.
22. Kurangnya ketersediaan daya dukung kapasitas energi listrik, air bersih dan perumahan baik bagi kegiatan masyarakat maupun untuk kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga mempengaruhi kinerja kegiatan ekonomi masyarakat akibat terbatasnya dukungan fasilitas tersebut.
23. Perkembangan perekonomian di Kepulauan Riau telah terjadi transformasi struktur perekonomian dari sektor primer (pertanian dan perikanan) ke sekunder dan tersier (industri dan jasa), namun tidak diiringi dengan transformasi



ketenagakerjaan. Dari waktu ke waktu sektor pertanian dan perikanan terhadap perekonomian wilayah terus mengalami penurunan seiring dengan peningkatan sektor lainnya (industri dan jasa). Namun keadaan sebaliknya terjadi kenaikan persentase penduduk (RTP) yang berkerja pada sektor pertanian dan perikanan dari tahun ke tahun, sedangkan peluang kerja sektor industri dan jasa mengalami peningkatan. Kepulauan Riau termasuk kategori daerah yang menonjol dari sektor industri dan jasa termasuk pariwisata namun belum tercapainya keseimbangan kontribusi sektor industri dengan kontribusi sektor pertanian khususnya sub sektor perikanan.

24. Rasa apatisme dan pesimisme masyarakat terhadap pemerintah yang cenderung semakin besar, sebagai akibat krisis kepemimpinan, krisis kepercayaan dan krisis keteladanan, hal ini terlukis dengan semakin maraknya demo, unjuk rasa yang mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah terutama terkait dengan kebutuhan mendasar masyarakat, yang diwarnai dengan tindakan brutal, anarkis dengan mengusung isu demokrasi maupun keadilan yang tidak menutup kemungkinan didukung atau didalangi oleh pihak ketiga atau pihak luar.

25. Sumber daya hayati alam Kepulauan Riau sangat beragam, terdapat aneka tipe hutan, seperti hutan mangrove di pantai, hutan tropika basah dataran rendah, dan juga hutan tropika basah pegunungan. Aneka tipe hutan menyebabkan kawasan Kepulauan Riau mendapat dukungan pelestarian untuk berbagai kegiatan masyarakat. Penyangga kehidupan Kepulauan Riau diharapkan dapat terpenuhi dengan adanya aneka macam tipe sumber daya hutan.

3.6. Strategi Pembangunan

Berdasarkan hasil analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan) serta identifikasi permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa strategi jangka panjang sebagai berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi
2. Pengembangan jaringan kerjasama antar wilayah
3. Pengembangan sektor pariwisata yang terintegrasi dengan dukungan lingkungan yang lestari
4. Pengembangan potensi daerah yang bertumpu pada sektor perikanan dan kelautan
5. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
6. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur wilayah



7. Perwujudan tata pemerintahan yang baik yang menjunjung supremasi hukum, berkeadilan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah
8. Pengoptimalan pengelolaan sumberdaya secara lestari
9. Pengembangan industri perikanan dan kelautan yang menghasilkan keuntungan lestari secara biologis, ekonomi dan ekologis
10. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan perairan dalam bentuk pola perusahaan inti rakyat
11. Penyusunan peraturan perundangan dan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang mantap
12. Pengembangan produk perikanan dan kelautan serta produk turunannya yang mempertimbangkan kelestarian ekologis
13. Pengembangan jaringan kerjasama dengan swasta dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
14. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dalam menghadapi persaingan global
15. Pengembangan ekonomi yang berbasis perikanan dan kelautan
16. Peningkatan kualitas dan daya saing produk perikanan dan kelautan
17. Pengembangan pendekatan pembangunan berwawasan lingkungan



Tabel SWOT

INTERNAL EKSTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas dan hasil capaian pembangunan b. Pluralitas sosial dan persatuan c. Geografis dan geostrategis berada di jalur perdagangan dunia dan pertumbuhan SIJORI d. Potensi sektor kelautan dan perikanan yang cukup besar untuk dikembangkan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Rendahnya daya saing b. Terbatasnya infrastruktur wilayah c. Lemahnya penegakan hukum dan pelaksanaan demokrasi d. Belum efektifnya penyelenggaraan pemerintahan daerah e. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya f. Dualisme ekonomi yang memunculkan efek demonstrasi kemakmuran oleh lapisan masyarakat yang memiliki kesempatan di sektor modern
PELUANG (O)	STRATEGI S-O (offensif)	STRATEGI W-O (perkuatan/konsolidasi)
<ul style="list-style-type: none"> a. Kemajuan ekonomi nasional dan negara tetangga b. Berbatasan dengan negara maju c. Perkembangan lingkungan global d. Dampak reformasi e. Pertumbuhan ekonomi nasional f. Efisiensi pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi b. Pengembangan jaringan kerjasama antar wilayah c. Pengembangan sektor pariwisata secara lestari 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan potensi daerah yang bertumpu pada sektor perikanan dan kelautan b. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia c. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur wilayah d. Perwujudan tata pemerintahan yang baik yang menjunjung supremasi hukum, berkeadilan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah e. Pengoptimalan pengelolaan sumberdaya secara lestari f. Pengembangan industri perikanan dan kelautan yang menghasilkan keuntungan lestari secara biologis (MSY), ekonomi (MEY) dan ekologis g. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan perairan dalam bentuk pola perusahaan inti rakyat
ANCAMAN (T)	STRATEGI S-T (diversifikasi)	STRATEGI T-W (pertahanan)
<ul style="list-style-type: none"> a. Pengaruh global b. InEfisiensi dan efektivitas pembangunan c. Kelestarian lingkungan d. Distribusi pembangunan e. Pengelolaan kawasan pesisir dan perbatasan f. Demokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan peraturan perundangan dan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang mantap b. Pengembangan produk perikanan dan kelautan serta produk turunannya yang mempertimbangkan kelestarian ekologis c. Pengembangan jaringan kerjasama dengan swasta dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dalam menghadapi persaingan global b. Pengembangan ekonomi yang berbasiskan perikanan dan kelautan c. Peningkatan kualitas dan daya saing produk perikanan dan kelautan d. Pengembangan pendekatan pembangunan berwawasan lingkungan

